

THE EFFECTIVENESS OF THE FAMILY HOPE PROGRAM AND NON – CASH FOOD ASSISTANCE ON THE WELFARE OF THE COMMUNITY OF BATURETNO VILLAGE, BANGUNTAPAN DISTRICT, BANTUL REGENCY

PENGARUH EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA BATURETNO KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

¹⁾Aprilia Dhita Kartika Sari, ²⁾Maria Magdalena PD, ³⁾Wendri Sukmarani, ⁴⁾Supardi Partowasito

^{1) 2) 3) 4)} Universitas Nusa Megarkencana

¹⁾apriadihita21@gmail.com, ²⁾mariastienus@gmail.com, ³⁾wendrisukmarani79@gmail.com, ⁴⁾supardistienusa60@gmail.com

Abstract

The Family Hope Program (PKH) and Non – Cash Food Assistance (BPNT) are aid programs issued by the government as an effort to increase the economic independence of the poor and as an effort to alleviate poverty. This research aims to determine the influence of The Family Hope Program on the welfare of the Baturetno village community, to determine the influence of Non – Cash Food Assistance on the welfare of the community in Baturetno village and to determine the influence of the effectiveness of PKH and BPNT together of the welfare of the Baturetno village community.

This research method uses quantitative methods. The population used was PKH and BPNT recipients with a sample size of 68 respondents. The data collection techniques used are questionnaires and documentation. Analytical techniques in this research are validation and reliability tests, class assumption tests, multiple regression tests and hypothesis tests.

The result of this research are the influence of PKH with the calculated r value obtained at $4.138 > t$ table 1.668 and a significance value of 0.05 which has a significant effect on community welfare. The effect of BPNT was obtained at $1.788 > t$ table 1.668 and a significance value of $0.078 > 0.05$ did not have a significant effect on community welfare. The influence of the effectiveness of PKH and BPNT is obtained by F count of $17.591 > F$ table 3.136 and significance value of $0.000 < 0.05$, so it can be concluded that the effectiveness of PKH and BPNT has a significant effect together for the welfare of the people of Baturetno village.

Keywords: Effectiveness, PKH, BPNT and Community Welfare.

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang mendasar dalam suatu negara. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan tetapi hingga saat ini masih banyak penduduk Indonesia yang termasuk dalam kategori keluarga sangat miskin. Kemiskinan yang terjadi di picu oleh kurangnya lapangan pekerjaan sehingga banyak masyarakat yang termasuk dalam kategori pengangguran. Banyak masyarakat Indonesia yang masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sekalipun mereka dalam status sedang bekerja.

Pemerintah Indonesia berkewajiban dalam menanggulangi kemiskinan dan perlu membuat suatu program nasional yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 “Fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh negara” dan ayat 2 “Negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”.

Program pengentasan kemiskinan yang selama ini dilaksanakan belum mampu memberikan dampak besar bagi masyarakat, dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah melalui Kementerian Sosial pada tahun 2007 mengeluarkan sebuah program pengentasan kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut Permensos No. 01 Tahun 2018 tentang PKH atau Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, di olah oleh Pusat Data Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari Pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau e-warong yang bekerjasama dengan bank. Bantuan sosial ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM.

Efektivitas merupakan alat ukur untuk mengetahui tercapainya tujuan suatu program, namun realitanya pada beberapa program yang sudah berjalan masih ada masalah yang muncul diantaranya tidak tepat sasaran atau belum semua Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang di kelola Kementerian Dalam Negeri, keterlambatan dalam pencairannya dana serta menjadikan masyarakat tidak mandiri dan bergantung pada bantuan, adanya kecemburuan sosial antar masyarakat.

B. KAJIAN LITERATUR

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan sesuai yang diharapkan, namun tidak menutup kemungkinan sebuah tujuan tidak sesuai dengan yang diharapkan maka yang harus dilakukan yaitu melihat kekurangan atau kelemahan dan merubah strategi yang dianggap tidak sesuai dalam mencapai tujuan pada suatu organisasi atau kelompok.

2. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN)

APBN merupakan anggaran yang secara khusus disediakan oleh negara sebagai dana untuk belanja tahunan. Menurut Undang – Undang No 17 Tahun 2003 dapat disimpulkan bahwa APBN adalah anggaran yang tersusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun penuh untuk sebuah negara.

3. Program Keluarga Harapan (PKH)

Menurut Permensos No. 1 Tahun 2018 Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, di olah oleh Pusat Data Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial PKH di wilayah sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur maupun sumber daya manusia dengan pengkondisian secara khusus. Keluarga Harapan atau PKH ini membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai layanan fasilitas kesehatan (faskes) dan layanan fasilitas pendidikan (fasdik) yang tersedia disekitar. Selain itu yang berhak mendapatkan PKH adalah ibu nifas, ibu menyusui atau ibu yang memiliki anak balita dan ibu yang memiliki anak yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Program ini juga didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat kontribusi dan Nawacita Presiden RI. Penyaluran bantuan sosial PKH dengan pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan atau seseorang miskin, tidak mampu dan rentan terhadap resiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH. Menurut Permensos No. 1 Tahun 2018 Pasal 2 PKH bertujuan :

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Keluarga penerima pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan. Menurut Permensos No. 1 Tahun 2018 sasaran PKH adalah keluarga miskin, tidak mampu dan rentan terhadap resiko sosial yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Kriteria penerima bantuan sosial PKH berdasarkan komponen sebagaimana yang dimaksud meliputi :

- a. Komponen kesehatan
 - Ibu hamil atau ibu nifas (maksimal dua kali kehamilan)
 - Anak berusia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun.
- b. Komponen pendidikan
 - Anak sekolah dasar (SD) atau madrasah ibtidaiyah atau sederajat
 - Anak sekolah menengah pertama (SMP) atau madrasah tsanawiyah atau sederajat
 - Anak sekolah menengah atas (SMA) atau madrasah aliyah atau sederajat
 - Anak usia 6 (enam) sampai 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- c. Komponen kesejahteraan sosial
 - Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun (maksimal satu orang dalam satu KK)
 - Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat (maksimal satu orang dalam satu KK).

Sasaran PKH Akses merupakan keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan di wilayah Akses yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. PKH Akses sebagaimana yang dimaksud terdiri atas wilayah :

- a. Pesisir dan pulau kecil
- b. Daerah tertinggal atau terpencil
- c. Perbatasan antar negara.

Besaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat yaitu :

Besaran Bantuan PKH

No	Komponen	Sub Komponen	Besaran Bantuan Per Tahun (Rp)
1.	Kesehatan	Ibu hamil atau nifas	3.000.000
		Anak usia 0 sampai 6 tahun	3.000.000
2.	Pendidikan	Anak sekolah dasar (SD)/MI/Sederajat	900.000
		Anak sekolah menengah pertama (SMP)/MTs/Sederajat	1.500.000
		Anak sekolah menengah atas (SMA)/MA/Sederajat	2.000.000
3.	Kesejahteraan Sosial	Lansia 70 tahun ke atas	2.400.000
		Penyandang disabilitas berat	2.400.000

Sumber : Kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh

Penyaluran bantuan PKH dilakukan melalui rekening, selama satu tahun bantuan PKH disalurkan dalam empat tahap atau 3 bulan sekali. Bantuan PKH diberikan maksimal hanya dua anak dalam satu kartu keluarga (KK). Balita yang merupakan anak ketiga dan seterusnya dalam Keluarga Penerima Manfaat PKH bisa didaftarkan dan mendapat bantuan jika ada kakaknya yang tidak lagi mendapat bantuan atau telah lulus sekolah. Keluarga Penerima Manfaat yang telah mendapatkan PKH memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu :

- a. Kesehatan

Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan atau petugas pelayanan kesehatan dan atau kader kesehatan di desa bagi ibu hamil atau nifas, ibu menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan bayi dan balita.
- b. Pendidikan

Mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan yang ada baik sekolah biasa, sekolah kampung, kursus maupun belajar ketrampilan bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun.
- c. Kesejahteraan Sosial
 - 1) Lansia

Memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
 - 2) Penyandang Disabilitas Berat

Memeriksa kesehatan, merawat kebersihan dan mengupayakan makan dengan makanan lokal.

Keluarga Penerima Manfaat yang tidak memenuhi kewajibannya akan mendapat sanksi berupa penangguhan atau penghentian bantuan sosial PKH. Keluarga Penerima Manfaat PKH setelah memenuhi kewajibannya dapat mendapatkan hak sebagai peserta, yaitu :

- a. Menerima bantuan sosial PKH
- b. Mendapatkan pelayanan dalam kegiatan oleh pendamping PKH
- c. Mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial

- d. Mendapatkan program komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Mekanisme pelaksanaan PKH menurut Permensos No 1 Tahun 2018 dilaksanakan dengan tahapan :

- a. Perencanaan, untuk menentukan lokasi dan jumlah calon penerima PKH yang bersumber dari data terpadu program penanganan fakir miskin. Sumber data calon penerima manfaat PKH dapat dikecualikan bagi : (1) korban bencana alam, (2) korban bencana sosial dan (3) komunitas adat terpencil.
- b. Penetapan calon peserta PKH, dilakukan untuk menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon penerima manfaat PKH menurut daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota dan kecamatan. Data tingkat kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan wilayah kepesertaan PKH. Penetapan calon peserta PKH ditetapkan oleh direktur yang menangani PKH.
- c. Validasi data calon penerima manfaat PKH merupakan pencocokan data awal calon penerima manfaat PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sesuai dengan kriteria komponen. Data awal calon penerima manfaat ini berasal dari penetapan calon peserta PKH sedangkan bukti dan fakta kondisi terkini dapat diperoleh melalui pengumpulan informasi dari calon penerima manfaat PKH atau sumber lain yang dapat dipercaya dengan didukung dokumen yang sah. Validasi data calon penerima manfaat dilaksanakan oleh pendamping sosial. Data yang tidak ada dalam data awal calon penerima manfaat, data tersebut tidak dapat menjadi calon Keluarga Penerima Manfaat PKH namun dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan tingkat daerah kabupaten atau kota kepada Kementerian Sosial dengan menggunakan mekanisme yang akan ditetapkan oleh Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- d. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH, berdasarkan hasil validasi calon penerima manfaat dan hasil verifikasi komitmen dan pemutakhiran data. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH melalui keputusan direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
- e. Penyaluran bantuan sosial PKH dilakukan secara non tunai. Besar manfaat, jumlah penerima dan lokasi bantuan ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH. Pelaksanaan penyaluran PKH dilaksanakan secara bertahap dalam satu tahun.
- f. Pendampingan PKH terdiri atas kegiatan fasilitasi, mediasi dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Pendampingan PKH bertujuan untuk memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat. Pendampingan PKH dilaksanakan oleh pendamping sosial yang bertugas : (1) memastikan bantuan sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat tepat jumlah dan tepat sasaran, (2) melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit satu kali dalam sebulan, (3) memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan dan pemenuhan kebutuhan dasar lain. Pendampingan kepada lansia oleh pendamping sosial di rektorat yang menangani urusan rehabilitas sosial lanjut usia sedangkan kepada penyandang disabilitas dilaksanakan oleh pendamping sosial di rektorat yang menangani urusan rehabilitas sosial penyandang disabilitas.
- g. Peningkatan kemampuan keluarga, dilaksanakan melalui pertemuan peningkatan kemampuan keluarga yang merupakan proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadi perubahan perilaku pada Keluarga Penerima Manfaat PKH.

- h. Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH, kegiatan untuk memastikan anggota terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial'
- i. Pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat PKH, dilaksanakan oleh pendamping sosial dan administrator pangkalan data. Administrator pangkalan data dalam melakukan kegiatan pemutakhiran data melalui informasi manajemen PKH.
- j. Transformasi kepesertaan PKH, proses pengakhiran sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH. Transformasi kepesertaan dilakukan melalui kegiatan pemutakhiran sosial ekonomi dan dapat bekerja sama dengan lembaga lain.

4. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari Pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau e-warong (elektronik warung gotong royong) yang bekerjasama dengan bank. Program Bantuan Pangan Non Tunai atau Program Sembako ini merupakan pengembangan dari bantuan pangan non tunai dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Akun elektronik yang digunakan pada program ini yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang memiliki fitur uang elektronik atau tabungan serta dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial.

Besaran manfaat Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai untuk bulan Januari dan Februari 2020 adalah Rp 150.000/KPM/bulan. Dalam rangka mengurangi dampak pandemi Covid-19, maka sejak bulan Maret 2020 Pemerintah menaikkan besaran manfaat menjadi Rp 200.000/KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai, hanya dapat ditukarkan dengan bahan pangan yang ditentukan. Tujuan dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu :

- a. Mengurangi beban yang dikeluarkan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan
- b. Memberikan makanan dengan gizi seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat
- c. Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas dan administrasi yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat
- d. Memberikan pilihan kepada Keluarga Penerima Manfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Program Bantuan Pangan Non Tunai memiliki beberapa manfaat yaitu :

- a. Menaikkan ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial
- b. Menaikkan transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)
- c. Meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial
- d. Menaikkan pertumbuhan ekonomi daerah terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan
- e. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan di lokasi dengan kriteria : (1) tersambung dengan jaringan internet atau sinyal, (2) terdapat e-warong. E-warong sebagai penyalur BPNT dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Peserta BPNT dipersyaratkan sebagai KPM yang tercantum dalam data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial. Keluarga Penerima Manfaat BPNT diutamakan untuk peserta PKH yang tercantum dalam data PPKS dan data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu

kesejahteraan sosial. Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) harus memenuhi prinsip yang telah ditetapkan, adapun prinsipnya sebagai berikut :

- a. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jumlah, jenis, kualitas, harga bahan pangan (beras dan/atau telur) dan lokasi e-Warong
- b. KPM tidak diarahkan pada e-Warong tertentu dan e-Warong tidak memaketkan bahan pangan yang menyebabkan KPM tidak mempunyai pilihan dan kendali terhadap jenis bahan pangan.
- c. E-Warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan ketepatan harga, kualitas, jumlah, waktu, sasaran dan administrasi
- d. Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan bahan pangan
- e. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM
- f. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM
- g. Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan BPNT sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku.

Berdasarkan Permensos No 20 Tahun 2019 mekanisme penyaluran BPNT dilakukan melalui tahapan berikut :

- a. Registrasi dan pembukaan rekening meliputi pembukaan rekening secara kolektif, pencetakan kartu, aktivasi dan distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Registrasi dan pembukaan rekening KPM BPNT dilakukan oleh Bank Penyalur berkoordinasi dengan direktur jenderal yang menangani pelaksanaan BPNT dan tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah kabupaten atau kota. Penyelesaian selambat – lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah data KPM BPNT diterima oleh Bank Penyalur. KPM BPNT yang telah memiliki rekening harus menggunakan rekening bantuan sosial yang ada.
- b. Edukasi dan sosialisasi ditunjukkan kepada :
 - 1) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota
 - 2) Perangkat kecamatan, desa atau kelurahan atau pendamping sosial bantuan sosial pangan
 - 3) E-warong
 - 4) KPM BPNT

Edukasi dan sosialisasi dilaksanakan tatap muka atau melalui media elektronik, media cetak, media sosial atau dalam jaringan (online). Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi dilakukan setelah registrasi dan pembukaan rekening bersamaan dengan distribusi, pengecekan keberadaan KPM dan aktivasi KKS.

- c. Penyaluran dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya. Proses penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan atau pemindahbukuan dana dari rekening direktorat yang menangani pelaksanaan BPNT. Pemindahbukuan dana dari rekening direktorat yang menangani pelaksanaan BPNT kepada Bank Penyalur ke rekening e-wallet KPM BPNT dilakukan selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari Kas Negara ke rekening direktorat yang menangani pelaksanaan BPNT di Bank Penyalur. Proses penyaluran BPNT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai belanja bantuan sosial yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Bank Penyalur menyediakan peralatan dalam pelaksanaan penyaluran BPNT di e-warong meliputi : mesin electronic data capture (edc) dan kertas cetak resi.

- d. Pembelian barang dilaksanakan setelah KPM menerima BPNT yang besaran nilai bantuan ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kemampuan keuangan negara. BPNT tidak dapat diambil secara tunai namun hanya dapat digunakan untuk pembelian barang berupa bahan pangan yang telah ditentukan dengan menggunakan KKS di e-warong. Pembelian barang dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan dengan menggunakan dana pada rekening e-wallet. Penggantian KPM BPNT dapat dilakukan sepanjang terjadi perubahan data, hal tersebut dilakukan karena KPM BPNT pindah alamat, tidak ditemukan di alamat, meninggal dunia, sudah mampu secara ekonomi, menolak menerima bantuan, memiliki kepesertaan ganda, menjadi pekerja migran indonesia sebelum melakukan aktivasi KKS. Penggantian KPM dikarenakan sudah mampu secara ekonomi berdasarkan hasil verifikasi dan validasi bupati atau walikota.

5. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan atau sejahtera dalam istilah umum (Kamus Besar Bahasa Indonesia), dalam istilah umum sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang – orang dalam keadaan makmur, sehat dan damai. Di Amerika Serikat, sejahtera menunjuk ke uang yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, namun tidak dapat bekerja atau yang keadaan pendapatannya diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan. Jumlah yang dibayarkan biasanya jauh dibawah garis kemiskinan dan juga memiliki kondisi khusus seperti sedang mencari pekerjaan, ketidakmampuan atau kewajiban menjaga anak yang mencegahnya tidak dapat bekerja.

Kesejahteraan Sosial tertuang dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 bahwa “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang menunjukkan bahwa pada beberapa warga negara belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara layak.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang menghasilkan data numerik (angka) yang di analisis dengan metode statistik. Sumber datanya menggunakan data primer berupa kuisioner dengan menggunakan skala likert sebagai instrument pengumpulan data, sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah Penerima bantuan PKH dan BPNT Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul yang berjumlah 210 orang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah probability sampling dengan rumus slovin yaitu sebanyak 68 orang. Teknik analisis data menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi linier berganda dan uji hipotesis.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur kuisioner valid atau tidak. Pengujian validitas pada penelitian ini dibantu dengan program SPSS 27.0 dengan 68 responden. 68 responden tersebut diolah dengan derajat keabsahan ($df = n-2$ jadi $df = 66$ dan menggunakan nilai signifikan 10% kemudian didapat r_{tabel} sebesar 0,2012. Kuisioner dapat dikatakan valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Hasil Uji Validitas Variabel Efektivitas PKH

Instrumen	r hitung	r tabel	Kriteria
X1.1	0,454	0,2012	Valid
X1.2	0,460	0,2012	Valid
X1.3	0,495	0,2012	Valid
X1.4	0,431	0,2012	Valid
X1.5	0,746	0,2012	Valid
X1.6	0,492	0,2012	Valid
X1.7	0,514	0,2012	Valid
X1.8	0,487	0,2012	Valid
X1.9	0,253	0,2012	Valid
X1.10	0,504	0,2012	Valid
X1.11	0,595	0,2012	Valid

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 27.0, Maret 2024

Hasil pengujian diatas maka seluruh pernyataan untuk variabel efektivitas PKH dikatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ sebesar 0,2012.

Hasil Uji Validitas Variabel Efektivitas BPNT

Instrumen	r hitung	r tabel	Kriteria
X2.1	0,830	0,2012	Valid
X2.2	0,648	0,2012	Valid
X2.3	0,810	0,2012	Valid
X2.4	0,384	0,2012	Valid
X2.5	0,724	0,2012	Valid
X2.6	0,725	0,2012	Valid
X2.7	0,439	0,2012	Valid
X2.8	0,579	0,2012	Valid
X2.9	0,550	0,2012	Valid
X2.10	0,630	0,2012	Valid
X2.11	0,693	0,2012	Valid

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 27.0, Maret 2024

Hasil pengujian diatas maka seluruh pernyataan untuk variabel efektivitas BPNT dikatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ sebesar 0,2012.

Hasil Uji Validitas Variabel Efektivitas Kesejahteraan Masyarakat

Instrumen	r hitung	r tabel	Kriteria
Y.1	0,715	0,2012	Valid
Y.2	0,724	0,2012	Valid
Y.3	0,689	0,2012	Valid
Y.4	0,637	0,2012	Valid
Y.5	0,650	0,2012	Valid
Y.6	0,379	0,2012	Valid

Y.7	0,704	0,2012	Valid
Y.8	0,686	0,2012	Valid
Y.9	0,626	0,2012	Valid
Y.10	0,680	0,2012	Valid
Y.11	0,752	0,2012	Valid

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 27.0, Maret 2024

Hasil pengujian diatas maka seluruh pernyataan untuk variabel efektivitas BPNT dikatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ sebesar 0,2012.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur kuisioner yang merupakan indikator dari variabel. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan rumus Alpha Crobach dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

Jika $r_{tabel} > r_{hitung}$ = konsisten

Jika $r_{tabel} < r_{hitung}$ = tidak konsisten

Berikut merupakan hasil uji reliabilitas dengan menggunakan program SPSS 27.0.

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

No	Variabel	r hitung	r tabel	Kriteria
1.	Efektivitas PKH	0,889	0,2012	Reliabel
2.	Efektivitas BPNT	0,670		Reliabel
3.	Kesejahteraan Masyarakat	0,853		Reliabel

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 27.0, Maret 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat :

- Variabel PKH (X_1) memiliki r hitung 0,889 > dari r tabel 0,2012 hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap pernyataan pada variabel PKH adalah konsisten sangata (reliabel) sedangkan untuk tingkat konsistensi (kehandalan) dari instrumen penelitian sebesar 88% yang artinya jika kuisioner ini digunakan secara berulang – ulang pada populasi akan menghasilkan nilai objektivitas, stabilitas, akurasi dan konsistensi yang tinggi pada pengaruh efektivitas PKH terhadap kesejahteraan masyarakat.
- Variabel BPNT (X_2) memiliki r hitung 0,670 > dari r tabel 0,2012 hal ini dapat disimpulkan bahwa untuk setiap pernyataan pada variabel BPNT adalah cukup konsisten (reliabel) sedangkan untuk tingkat konsistensi (kehandalan) dari instrumen penelitian sebesar 67% itu artinya jika kuisioner ini digunakan berulang – ulang pada populasi akan menghasilkan nilai objektivitas, stabilitas, akurasi dan konsistensi yang cukup tinggi pada pengaruh efektivitas BPNT terhadap kesejahteraan masyarakat.
- Kesejahteraan Masyarakat (Y) memiliki r hitung 0,853 > dari r tabel 0,2012 hal ini dapat disimpulkan bahwa untuk setiap pernyataan pada variabel kesejahteraan masyarakat adalah konsisten sangat tinggi (reliabel) sedangkan untuk tingkat konsistensi (kehandalan) dari instrumen penelitian sebesar 85% yang artinya jika kuisioner ini digunakan berulang – ulang pada populasi akan menghasilkan nilai objektivitas, stabilitas, akurasi dan konsistensi yang sangat tinggi.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

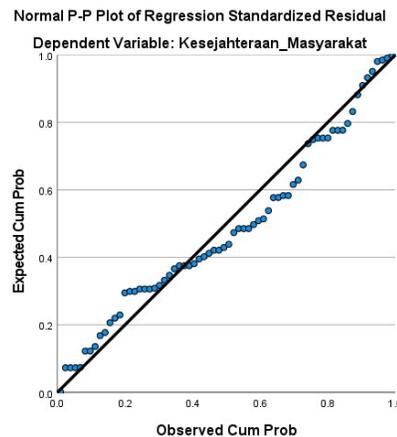
Uji normalitas kolmogorov smirnov merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah suatu sampel data atau variabel tertentu berasal dari populasi yang memiliki distribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan yaitu jika nilai signifikansi > 0,05 maka data dianggap berdistribusi normal.

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		68
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.24516336
Most Extreme Differences	Absolute	.107
	Positive	.107
	Negative	-.101
Test Statistic		.107
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.053
a. Test distribution is Normal.		

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 27.0, Maret 2024

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan nilai signifikansi sebesar $0,053 > 0,05$ maka nilai tersebut menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal. Uji normalitas juga dapat dilihat dengan grafik normal P-plot sebagai berikut :



Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 27.0, Maret 2024

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa titik – titik tersebar diantara garis diagonal dan mengikuti garis diagonal maka model regresi layak digunakan.

b. Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas dalam model regresi.

Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	17.030	4.629		3.679	.000		
	PKH	.481	.116	.469	4.138	.000	.776	1.288
	BPNT	.150	.084	.203	1.788	.078	.776	1.288

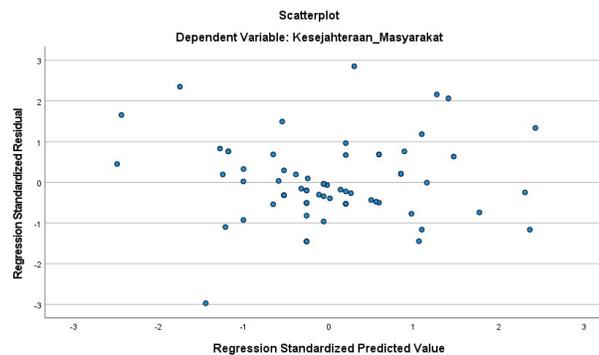
a. Dependent Variable: Kesejahteraan_Masyarakat

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 27.0, Maret 2024

Berdasarkan tabel diatas, nilai Varian Inflation Factors (VIF) pada semua variabel bebas yaitu variabel PKH dan variabel BPNT tidak lebih besar dari 10,00 dan hasil tolerance juga tidak terdapat nilai kurang dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antara variabel independen atau tidak terjadi multikolinieritas.

c. Hasil Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.



Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 27.0, Maret 2024

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa titik – titik tersebar secara acak atau random dan tidak membentuk pola serta titik – titik berada diatas dan dibawah angka nol maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Hasil Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda merupakan model regresi dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen, jika hasil positif maka menunjukkan pengaruh searah antara variabel.

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17.030	4.629		3.679	<.001
	PKH	.481	.116	.469	4.138	<.001
	BPNT	.150	.084	.203	1.788	.078

a. Dependent Variable: Kesejahteraan_Masyarakat

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 27.0, Maret 2024

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan persamaan sebagai berikut :

$$Y = 17,030 + 0,481X_1 + 0,150X_2 + e$$

Dari persamaan tersebut dijelaskan bahwa :

- 1) Variabel Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memiliki koefisien positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
- 2) Koefisien Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki nilai 0,481 yang artinya variabel Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh searah dengan kesejahteraan masyarakat desa Baturetno.
- 3) Koefisien Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memiliki nilai 0,150 yang artinya variabel Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berpengaruh searah dengan kesejahteraan masyarakat desa Baturetno.

4. Hasil Uji Hipotesis

a. Hasil Uji T Parsial

Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing – masing variabel independen yaitu PKH dan BPNT secara terpisah terhadap variabel dependen yaitu kesejahteraan masyarakat. Berikut merupakan hasil pengujian menggunakan SPSS 27.0.

Hasil Uji T Parsial

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17.030	4.629		3.679	.000
	Efektivitas PKH	.481	.116	.469	4.138	.000
	Efektivitas BPNT	.150	.084	.203	1.788	.078

a. Dependent Variable: Kesejahteraan_Masyarakat

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 27.0, Maret 2024

Berdasarkan tabel hasil uji T parsial diatas, dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Variabel efektivitas PKH (X_1)
Nilai t hitung pada variabel efektivitas PKH (X_1) diperoleh $4,138 > t$ tabel $1,668$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 > 0,05$ maka dapat disimpulkan

bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa Baturetno.

2) Variabel efektivitas BPNT (X_2)

Nilai t hitung pada variabel efektivitas BPNT (X_2) diperoleh $1,788 > t$ tabel $1,668$ dan nilai signifikansi sebesar $0,078 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa Baturetno.

b. Hasil Uji F Simultan

Uji F simultan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara bersama – sama atau simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil Uji F Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	388.247	2	194.124	17.591	.000 ^b
	Residual	717.282	65	11.035		
	Total	1105.529	67			
a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat						
b. Predictors: (Constant), Efektivitas BPNT, Efektivitas PKH						

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 27.0, Maret 2024

Berdasarkan hasil pengujian diatas, diperoleh F hitung sebesar $17,591 > F$ tabel $3,136$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas PKH dan BPNT berpengaruh secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat.

c. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependen.

Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.593 ^a	.351	.331	3.322
a. Predictors: (Constant), Efektivitas BPNT, Efektivitas PKH				

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 27.0, Maret 2024

Berdasarkan hasil uji determinasi dengan model summary dari analisis regresi berganda didapat nilai Adjusted R Square sebesar $0,331$, hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dapat menjelaskan efektivitas PKH dan BPNT mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa Baturetno sebesar 33% sedangkan sisanya 67% dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya.

5. Pembahasan

a. Pengaruh Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Baturetno

Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penangan fakir miskin, di olah oleh Pusat Data Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Berdasarkan hasil kuisioner dan wawancara yang telah dilakukan kepada responden bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa Baturetno dengan hasil yaitu nilai t hitung $4,138 > t$ tabel $1,668$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dari kuisioner dengan 68 responden. Tingkat hubungan PKH dan kesejahteraan masyarakat dapat diketahui dengan melihat tabel koefisien korelasi sebagai berikut:

Interval Koefisien

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,20	Tidak Ada Korelasi
0,21 – 0,40	Lemah
0,41 – 0,60	Sedang
0,61 – 0,80	Kuat
0,81 – 1,00	Sempurna

Sumber : <https://info.populix.co/articles/koefisien-korelasi-adalah/>

Berdasarkan tabel diatas pengaruh efektivitas PKH terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Baturetno dengan 68 responden hasil nilai korelasinya $0,565$ maka dapat dikatakan korelasi derajat hubungan sedang dan bentuk hubungannya positif. Diperkuat kembali dengan hasil uji koefisien determinasi (R^2) menggunakan model summary nilai diperoleh sebesar $0,331$ artinya pengaruh efektivitas PKH terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Baturetno hanya $33,1\%$ dan sisanya dipengaruhi faktor lain. Analisis efektivitas terdapat 5 indikator yang digunakan sebagai berikut :

1) Ketepatan waktu

Pada ketepatan waktu terdapat 2 pernyataan yang diajukan yaitu sosialisasi jadwal pernyataan dan ketepatan waktu penyaluran, dari kedua pernyataan tersebut mendapatkan hasil sangat efektif karena dalam pensosialisasian jadwal langsung disampaikan oleh pendamping PKH melalui grup whatsapp masing – masing kelompok. Penyaluran PKH dilakukan setiap 3 bulan sekali sesuai dengan ketentuan tetapi beberapa KPM merasa penyaluran PKH terkadang masih terlambat.

2) Ketepatan jumlah

Indikator ketepatan jumlah diajukan 2 pernyataan, dari pernyataan tersebut dapat dikatakan sangat efektif karena sudah sesuai dengan kriteria penerima PKH namun masih ada beberapa KPM yang merasa bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) belum dapat mencukupi kebutuhan keluarga.

3) Ketepatan tujuan

Indikator ketepatan tujuan diajukan 3 pernyataan dengan hasil efektif, sebagian besar KPM digunakan untuk biaya pendidikan dan merasa bahwa adanya PKH dapat meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga tetapi sebagian KPM tidak menggunakan untuk biaya pemeriksaan.

4) Ketepatan sasaran

Indikator ketepatan sasaran diajukan 2 pernyataan yang hasilnya dapat dikatakan efektif dengan pernyataan kriteria yang terdapat dalam keluarga dan kelayakan dalam menerima bantuan, namun jika dilihat dari segi bangunan dan barang yang dimiliki KPM dapat dikatakan sudah mampu.

Menurut wawancara dengan pendamping PKH terdapat beberapa KPM lanjut usia hanya sendiri dalam satu KK yang dalam ketentuan seharusnya minimal dua orang dalam satu KK dan beberapa KPM termasuk masyarakat berada dikarenakan sejak terjadinya covid-19 semua data masyarakat dimasukkan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kecuali PNS.

5) Ketepatan administrasi

Indikator ketepatan administrasi pernyataan yang diajukan semuanya memperoleh hasil efektif karena KPM tentunya tidak hanya memperoleh satu jenis bantuan namun hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan KPM tersebut sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), ada juga beberapa ketidaksesuaian dengan yang terjadi di lapangan seperti alur sebelum menerima bantuan sebagai KPM lama dan baru ada beberapa perubahan.

Penelitian ini juga mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu skripsi “Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2019” yang di tulis oleh Rima Eliza. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu kuisioner dan dokumentasi dengan empat indikator efektivitas (waktu, jumlah, tujuan dan sasaran). Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh terhadap kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

b. Pengaruh Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Baturetno

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari Pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau e-warung (elektronik warung gotong royong) yang bekerjasama dengan bank.

Berdasarkan hasil kuisioner dan wawancara yang telah dilakukan kepada responden bahwa efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa Baturetno dengan hasil yaitu nilai t hitung $1,788 > t$ tabel $1,668$ dan nilai signifikansi sebesar $0,078 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan tingkat hubungan BPNT dengan kesejahteraan masyarakat dari tabel interval koefisien memiliki hasil nilai korelasi $0,425$ maka dapat dikatakan korelasi derajat hubungan sedang dan bentuk hubungannya positif sedangkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) dengan model summary nilai yang diperoleh $0,331$ dengan presentase $33,1\%$ sedangkan sisanya sebesar $66,9\%$ dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil pengujian menunjukkan adanya pengaruh positif namun tidak terlalu signifikan antara variabel Bantuan Pangan Non Tunai dengan kesejahteraan masyarakat. Analisis efektivitas terdapat 5 indikator yang digunakan sebagai berikut :

- 1) Ketepatan waktu
Indikator ketepatan waktu di desa Baturetno sudah dapat dikatakan efektif karena penyaluran BPNT tidak ada penundaan dan tepat waktu. Menurut beberapa ketua pada masing – masing kelompok juga menyampaikan hal tersebut benar adanya.
- 2) Ketepatan jumlah
Indikator ketepatan jumlah diajukan 2 pernyataan mengenai jumlah yang diterima setiap bulannya dapat dikatakan efektif karena sudah sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak ada pengurangan jumlah besaran namun pernyataan mengenai penukaran di e-warong memperoleh hasil kurang efektif karena pada beberapa e-warong memberikan besaran harga yang berbeda jadi banyak KPM yang ragu untuk menukarkan bantuan di e-warong tersebut.
- 3) Ketepatan tujuan
Indikator ketepatan tujuan mengajukan 2 pernyataan dan memperoleh hasil efektif karena dapat meringankan beban hidup dalam pemenuhan kebutuhan bahan pangan dan memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang dalam keluarga KPM.
- 4) Ketepatan sasaran
Indikator ketepatan sasaran memperoleh hasil efektif pada pernyataan yang diajukan karena sebagian besar penerimanya yaitu penerima PKH dan bantuan ini dapat membantu meningkatkan penghasilan KPM dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan.
- 5) Ketepatan adminstrasi
Indikator ketepatan adminstrasi pernyataan yang diajukan ada 3 dan memperoleh hasil efektif mengenai penerima BPNT juga menerima bantuan lain dan alur sebelum penerimaan BPNT karena sudah sesuai ketentuan bahwa penerima BPNT juga memperoleh bantuan lain seperti PKH atau bantuan lainnya kemudian pernyataan mengenai penerima BPNT mendapatkan KKS memperoleh hasil sangat efektif karena penyaluran bantuan ini dilakukan secara elektronik dan dapat ditukarkan hanya di e-warong yang bekerjasama dengan bank penyalur.
Penelitian ini juga mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu “Pengaruh Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Di Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang) Tahun 2022” yang di tulis oleh Muharir. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, kuisisioner dan dokumentasi dengan tiga indikator data, pengelolaan data dan implementasi penyaluran. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah telah memenuhi sasaran dan sesuai standar yang telah ditetapkan dan tingkat kesejahteraan masyarakat memiliki konfisi yang relatif baik, selain itu hasil dari uji statistik pada penelitian ini yaitu bantuan PKH dan BPNT sebagian berpengaruh secara signifikan terhadap pola konsumsi masyarakat Desa Tirta Makmur.

c. Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Baturetno

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan bahwa secara simultan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa Baturetno dengan hasil yang diperoleh yaitu nilai f hitung sebesar $17,591 > F$ tabel $3,136$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas PKH dan BPNT berpengaruh secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Besarnya pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap kesejahteraan masyarakat desa Baturetno juga diukur menggunakan koefisien determinasi sebesar $0,331$, hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dapat menjelaskan efektivitas PKH dan BPNT mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa Baturetno sebesar $33,1\%$ sedangkan sisanya $66,9\%$ dipengaruhi oleh faktor lainnya. Selain hasil uji statistik, penelitian ini juga melihat dari beberapa indikator efektivitas seperti ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan tujuan, ketepatan sasaran dan ketepatan administrasi.

Penelitian ini juga mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu skripsi “Pengaruh Efektivitas Program Keluarga Harapan Dan Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Tahun 2021” yang ditulis oleh Eka Rizki Rahmawati. Metode pengumpulan data yang digunakan kuisioner dan dokumentasi dengan lima indikator (waktu, jumlah, tujuan, sasaran dan administrasi). Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh secara signifikan dengan tingkat hubungan yang masih rendah terhadap kesejahteraan masyarakat sedangkan efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berpengaruh secara signifikan dengan tingkat hubungan cukup kuat terhadap kesejahteraan masyarakat. Efektivitas PKH dan BPNT secara bersama – sama mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa Jagarana.

E. KESIMPULAN

1. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Baturetno karena dapat membantu mencukupi kebutuhan keluarga terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan serta dapat membantu meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga.
2. Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak berpengaruh secara signifikan tetapi memiliki tingkat hubungan sedang terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Baturetno karena dapat membantu meringankan beban hidup keluarga dalam pemenuhan kebutuhan bahan pangan namun belum bisa memenuhi kebutuhan keluarga.
3. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara bersama – sama berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Baturetno karena dapat membantu meningkatkan produktivitas keluarga dan dapat memudahkan keluarga dalam memperoleh akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta membantu membuka peluang usaha atau pekerjaan dalam keluarga.

F. REFERENSI

- Adiputra. (2021). *Penelitian Deskriptif*. Diambil kembali dari <https://repository.stei.ac.id/penelitian-deskriptif>.
- Ananda, I. S. (2023). *Anggaran 2023 Senilai Rp78 Triliun, Kemensos Pastikan Terkelola dengan Transparan dan Akuntabel*. Diambil kembali dari <https://kemensos.go.id/anggaran-2023-senilai-rp78-triliun-kemensos-pastikan-terkelola-dengan-transparan-dan-akuntabel>

- Andari. (2023, November 12). *Bansos PKH Agustus 2023, Kapan Tanggal Pencairan PKH Tahap 4?*
- Balikipapan, D. (2022, Oktober 27). *Pentingnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan*.
- Binus. (2018). *Memahami Analisis Regresi Linier Berganda*.
- BPS. (2022, November 30). *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik/BPS
- BPS. (2023). *Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Maret 2023*. Diambil kembali dari bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/172016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html
- BPS. (2023). *Penduduk Miskin*.
- Fajriati, N. I., Isnaeni, N., & Ridhwan. (2018). Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Kecamatan Tungkal Ilir).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gramedia. (2020). *I Made : Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif : Teori, Penerapan dan Riset Nyata*. Diambil kembali dari <https://www.gramedia.com>
- Kemenkes. (2019). *Program Indonesia Sehat untuk Mensejahterakan Masyarakat*. Diambil kembali dari <https://ayosehat.kemkes.go.id/program-indonesia-sehat-untuk-mensejahterakan-masyarakat>
- Kemensos. (2019). *Program Keluarga Harapan (PKH)*. Diambil kembali dari kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh
- Kominfo. (2018). *Program Bantuan Sosial untuk Rakyat*.
- Kominfo. (2019). PKH dan BPNT Turunkan Angka Kemiskinan Hingga 9 Persen, 11 April 2023
- Made, I. (2020). *Analisis Data*.
- Mawarni, K. S. (2019). Pengaruh Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.
- Menteri Kesehatan Nila F Moeloek "Program Indonesia Sehat terdiri dari tiga elemen yang saling menguatkan". (2021). Diambil kembali dari <https://sehatnegriku.kemkes.go.id/baca/umum/20190521/553014/program-indonesia-sehat-capai-tingkat-kesehatan-tertinggi>
- Muharir. (2022). Pengaruh Bantuan Program keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang).
- Nurfazlina. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Pekanbaru Riau.
- Permensos. (2018). *Permensos No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)*. Diambil kembali dari <https://peraturan.bpk.go.id>
- Permensos. (2019). *Permensos No 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai*. Diambil kembali dari <https://peraturan.bpk.go.id>
- Poerwanti, & Suwandayani. (2020). *Keefektifan*.
- Pratama, E. R. (2023). *Alasan Bansos PKH Balita Hanya Diberikan Maksimal Kepada Dua Anak*. Diambil kembali dari <https://pontianak.tribunnews.com/2023/06/11/alasan-bansos-pkh-balita-hanya-diberikan-maksimal-kepada-dua-anak-ini-ketentuannya>
- R, E. (2019). Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 46-80.
- Rahmawati, E. R. (2021). Pengaruh Efektivitas Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Jagarana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.
- Realisasi Keluarga Penerima Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (KPM BPNT)* . (2023). Diambil kembali dari <https://data.ntbprov.go.id/dataset/realisasi-keluarga-penerima-manfaat-program-bantuan-pangan-non-tunai-kpm-bpnt>

- Redaksi. (2019). *Kesejahteraan Masyarakat Indonesia*. Diambil kembali dari <https://uinsgd.ac.id/kesejahteraan-masyarakat-indonesia>
- Schoolmedia. (2021). *Alokasi anggaran Perlindungan Sosial Ditambah*. Diambil kembali dari <https://news.schoolmedia.id/berita/Alokasi-Anggaran-Perlindungan-Sosial-Ditambah-2993>
- Sugiyono. (Cetakan ke-3, 2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Undang - Undang No 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan. (2013).
- Undang - Undang No 14 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman. (1992).
- Undang - Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Anggaran Belanja Negara. (2003). Diambil kembali dari <https://iblam.ac.id/2023/12/03/pengertian-apbn-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara>
- Undang - Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. (2009).
- Unsiba. (2022). *Indikator Pendidikan Berkualitas dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*.
- UU. (2006). *Undang - Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk*. Diambil kembali dari <https://peraturan.bpk.go.id>
- UU No 23 Tahun 2013 Tentang Kependudukan. (2013).
- UUD. (1945). *Pasal 34 ayat 1 : Fakir miskin dan anak - anak terlantar dipelihara oleh negara*.
- UUD. (1945). *Pasal 34 ayat 2 : Negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat manusia*.
- Walfajrin. (2018). *Pengaruh Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Sangat Miskin Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang*.